

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipamerkan di muka, maka kesimpulan penelitian dirumuskan berikut.

1. Efektivitas pelayanan otonomi daerah dengan titik berat pada kabupaten/kota sangat tergantung kepada empat faktor yang mempengaruhinya, yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu: faktor kondisi lingkungan, karakteristik kemampuan aparatur pemerintah, hubungan antara organisasi, dan tersedianya sumber-sumber. Keempat faktor tersebut mempunyai derajat pengaruh yang berbeda terhadap pelaksanaan otonomi daerah, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Secara bersama-sama, faktor kondisi lingkungan mempunyai derajat pengaruh paling tinggi (84,64%), karakteristik kemampuan aparatur pemerintah (59,29%), hubungan antara organisasi (47,06%), dan faktor tersedianya sumber-sumber (41,99%). Secara terpisah, faktor kondisi lingkungan menjadi urutan kedua (6,17%), setelah faktor karakteristik kemampuan aparatur pemerintah (10,11%), disusul faktor tersedianya sumber-sumber (0,95%), dan faktor hubungan antar organisasi (0,87%).
2. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah ialah faktor kondisi lingkungan dan karakteristik kemampuan aparatur pemerintah.

3. Implikasi terhadap pengembangan manajemen pendidikan secara filosofis harus merujuk pada paradigma sistem pendidikan yang universal, karena visi dan misi serta prinsip pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan nilai-nilai yang melekat pada pendidikan. Secara teoritis, sistem manajemen pendidikan merupakan sistem yang berbeda dari sistem-sistem lainnya, sehingga perangkat pendukung pelaksanaan otonomi dalam bidang pendidikan merupakan strategi manajemen yang tidak harus tergantung pada sistem administrasi politik dan ketatanegaraan. Dalam tatanan praktek organisasi dan kelembagaan pendidikan di lapangan, sistem manajemen pendidikan memerlukan deregulasi sistem hukum dan perundang-undangan pendidikan, penyesuaian struktur organisasi, dan peningkatan profesionalisasi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Implementasi kebijakan pemberian otonomi kepada daerah dalam bidang pendidikan tidak perlu diseragamkan bagi seluruh wilayah Indonesia, tetapi harus memperhitungkan keanekaragaman kondisi dan potensi wilayah setiap kabupaten/kota. Namun, tidak berarti melakukan diskriminasi dan mendorong dualisme antara pulau Jawa dan luar Jawa, atau antara Indonesia Timur dan Barat. Kenyataan adanya perbedaan tingkat kemampuan dan keragaman kondisi masing-masing wilayah tidak bisa diabaikan dan menuntut perlunya diadakan tipologi kabupaten/kota.

Keseragaman secara fundamental memang perlu, namun keragaman secara kondisional tidak boleh diabaikan. Adanya tingkatan otonomi yang dibedakan dengan terminologi otonomi terbatas, otonomi luas, dan otonomi muni menurut UU.No.22 Tahun 1999, patut diantisipasi munculnya tarik-menarik kekuasaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tampaknya perlu ada aturan pelaksanaan yang memberi ketegasan dalam sistem otonomi bertingkat menjadi sistem otonomi tidak bertingkat. Artinya, secara vertikal hanya dikenal satu daerah otonomi dan secara horizontal dibedakan antara daerah otonom yang bersifat *rural society* dan daerah otonom yang bersifat *urban society*. Dengan demikian, peranan dan posisi daerah otonom kabupaten dan kota akan lebih jelas sebagai satu-satunya daerah otonom yang berhak mengurus rumah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga, kedudukan kepala daerah lebih bersifat *alat daerah* dan direkrut menurut proses dari bawah berdasarkan asas desentralisasi. Kedudukan provinsi tidak lagi sebagai daerah otonom, tetapi sebagai daerah administrasi yang berperan menjalankan fungsi dekonsentrasi dan mewakili pemerintah pusat guna melakukan pengawasan, koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

2. Untuk mencari format pelaksanaan otonomi daerah melalui sistem otonomi tidak bertingkat tersebut dan memperkuat peran provinsi dalam menjalankan fungsi dekonsentrasi, perlu diadakan penelitian-penelitian

lebih lanjut dan pengkajian yang lebih mendalam, karena bukan hanya menyangkut perlunya strategi implementasi semata, namun berkaitan pula dengan aspek pelaku dan aspek rumusan kebijakan yang lebih luas.

3. Hambatan utama yang patut diantisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, ialah masih kuatnya kecenderungan sikap dan perilaku ego-sentralistik birokrat dan elite politik tingkat pusat dalam memperlakukan asas desentralisasi yang dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Kecenderungan ini, akan membatasi keluasaan berprakarsa dan mengambil keputusan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena dalam setiap implementasi kebijakan yang menyangkut otonomi daerah selalu disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang rinci, serta pengawasan represif.
4. Berubahnya IKIP menjadi universitas, seperti IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), jangan semata-mata dipandang sebagai upaya mengganti *trade-mark*, atau hanya sekedar menambah beban dengan tambahan *mission*, tetapi juga harus dijadikan peluang untuk mencoba membangun kembali paradigma disiplin ilmu pendidikan yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam pengembangan teori dan praktek-praktek pendidikan. Karenanya, profesionalisasi dalam teori dan praktek manajemen pendidikan menjadi suatu keharusan. Pengembangan paradigma ilmu administrasi pendidikan pun bukan hanya terbatas pada sistem persekolahan, namun harus merujuk pada paradigma pendidikan yang lebih komprehensif dan universal. Dengan demikian,

praktek manajemen pendidikan menjadi suatu keharusan. Pengembangan paradigma ilmu administrasi pendidikan pun bukan hanya terbatas pada sistem persekolahan, namun harus merujuk pada paradigma pendidikan yang lebih komprehensif dan universal. Dengan demikian, pengembangan kurikulum program studi administrasi dan manajemen pendidikan, baik pada tingkat S-1, S-2 maupun S-3 bukan semata-mata berorientasi kepada paradigma restriksi politik yang sering berubah-ubah, tetapi lebih banyak berorientasi pada restriksi administrasi yang berlandaskan pada paradigma pendidikan yang universal.

5. Mengingat komponen-komponen yang diteliti terbatas pada faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah, dan lebih banyak menarik implikasi secara konseptual, maka diperlukan penelitian lanjutan yang berkenaan dengan spesifikasi, standarisasi dan model-model praktek manajemen pendidikan di lingkungan organisasi sistem pendidikan dan organisasi kelembagaan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

